

Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan

SAMIE L JACOBS
JONDRY A HETHARIE

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Manajemen (STIEM) Rutu Nusa Ambon
Jl. Dr. Kayadoe No. 80-82 Ambon
email : jondry_ub@rocketmail.com

Diterima 2 September 2011; disetujui 19 Februari 2012

Abstract: *National Program of Empowerment of Self-Supporting Countryside Society (PNPM-MP) launched as the follow-up of anticipaty program of poorness and empowerment of previous society like Program of Inpres Countryside Left Behind (IDT), Empowerment Program Of Society Affect Economic Crisis (PDM-DKE) with program emphasis at empowerment of society and empowerment of institute in district storey;level / countryside and canton. National Program of Empowerment of Self-Supporting Countryside Society (PNPM-MP) as continuation to Program of Inpres Countryside Left behind, development of countryside coordinated by Directorate Generaling Countryside Development for example having goals qualitative and quantitative like activity in the form of capital employed aid and is ready of medium and infrastructure which supporting productive economic activity [pass/through] institute in district storey;level and countryside. National Program of Empowerment of Self-Supporting Countryside Society (PNPM-MP) represent study media to government officer and society activity of transparent and democratic decision making, goodness in the plan, execution and continuation of activity program.*

Keywords: *PNPM-MP, Enableness.*

PENDAHULUAN

Program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Indonesia sejak Repelita pertama telah memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan desa. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan desa memegang peranan yang sangat strategis dalam upaya pembangunan daerah, dan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Perhatian yang besar terhadap pembangunan desa tersebut dapat dilihat dari berbagai program yang ada baik

sektoral, regional dan program yang berskala nasional seperti program inpres. Dalam proses pembangunan nasional tersebut, kurang lebih selama tiga dasawarsa, Pemerintah Indonesia telah mampu meningkatkan perkembangan usaha perekonomian masyarakat yang diikuti dengan peningkatan taraf hidup masyarakat dan pengurangan jumlah penduduk miskin. Strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam upaya tersebut adalah pada pemindahan sumber-sumber pendapatan dari pusat ke daerah dalam bentuk Inpres dan perluasan jangkauan lembaga

perkreditan untuk rakyat kecil seperti KUPEDes, Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Canda Kulak (KCK), Kredit Usaha Tani (KUT).

Hasil yang dicapai tersebut seakan belum berarti dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, hal ini ditambah lagi dengan datangnya krisis moneter yang dialami Bangsa Indonesia pada tahun 1997 dan berlanjut dengan krisis ekonomi. Pada fase tersebut pertumbuhan ekonomi terhenti total dan laju inflasi meningkat pesat yang berakibat pada penurunan tajam taraf hidup masyarakat. Jumlah penduduk miskin dan pengangguran meningkat pesat.

Upaya pemulihan perekonomian bangsa yang terpuruk tersebut, antara lain dilakukan dengan memadukan pelaku ekonomi lemah dan tertinggal dengan teknologi tradisional bermitra dengan pelaku ekonomi yang maju dan berkembang dengan teknologi modern serta dengan pemberdayaan masyarakat. Upaya ini tampak dalam Visi Pembangunan Nasional yang merupakan tujuan yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin (GBHN 2004;46).

Pada tahun 2007 melalui Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yodoyono dicanangkan salah satu Program Pemberdayaan dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Program yang dikembangkan oleh pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi khususnya masyarakat ekonomi lemah. Program ini

dulunya dikenal dengan nama program Proyek Pembangunan Kecamatan (PPK), program ini merupakan kelanjutan dari program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan sebelumnya seperti Program Inpres, Program Pembangunan Kawasan Terpadu (P2KT), Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Usaha Ekonomi Desa di bidang Simpan Pinjam (UED-SP) dan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa PDM-DKE atau Program Pemberdayaan Masyarakat Dampak Krisis Ekonomi dan PEMP (Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir).

Secara umum tujuan program pemberdayaan masyarakat adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bertolak dari gambaran diatas oleh pemerintah ditetapkan Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan sebagai salah satu daerah penerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), dengan jumlah penduduk yang merupakan salah satu indikator penerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Perkembangan Jumlah penduduk Kecamatan Leksula pada tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 1.

Pada tahun 2011 perkembangan penduduk Kecamatan Leksula yang tersebar pada 31 desa dan dusun yang dirincikan per jenis kelamin berjumlah 16.348 jiwa, di mana jumlah jiwa laki-laki sebesar 8.263 jiwa dan perempuan sebanyak 8.085 jiwa. Demikian pula dengan jumlah penduduk

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kecamatan Leksula per Jenis Kelamin Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2011

Jumlah Penduduk		
Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
8.263	8.085	16.348

Sumber : Kantor Kec Leksula

Desa Leksula Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan yang dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini, menggambarkan penyebaran penduduk untuk laki-laki sebanyak 1.310 jiwa, perempuan 1.421 jiwa dengan jumlah jiwa sebesar 2.731 jiwa.

Berdasarkan pengamatan pada lokasi penelitian terlihat bahwa jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan masih sangat besar ini tergambarkan pada jumlah Keluarga Miskin (KK) untuk 3 tahun terakhir yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, yang dapat dijelaskan pada tabel 3.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Buru Selatan telah dilaksanakan mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Jumlah dana yang dikucurkan sesuai dengan besarnya kebutuhan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) berdasarkan

laporan pelaksanaan PNPM-MP, Kecamatan Leksula adalah salah satu Kecamatan yang telah berhasil dalam melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), di mana kecamatan ini telah melaksanakan program selama beberapa tahun anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif.

Dari data tersebut, rekapitulasi lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Buru Selatan Tahun anggaran 2009, untuk alokasi APBN sebesar Rp.12.000.000.000, sedangkan untuk alkasi APBD sebesar Rp. 3.000.000.000 dengan total anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000, dimana masing-masing kecamatan yang ada di kabupaten buru Selatan masing-masing menerima anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah sebesar anggaran Rp. 300.000.000.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Leksula Per Jenis Kelamin Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011

Jumlah Penduduk		
Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1.310	1.421	2.731

Sumber : Kantor Kec Leksula

Tabel 3
Jumlah Keluarga Miskin di Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2011

Tahun	KK Miskin
2009	645
2010	562
2011	440

Sumber : Kantor Kec Leksula

Tabel 4
Rekapitulasi Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri di Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009

Kec	PNPM Perdesaan(Rp juta)	APBN(Rp Juta)	APBD
Amabalau	Rp.300.000.000	Rp.2.400.000.000	Rp.600.000.000
Kepala Madan	Rp.300.000.000	Rp.2.400.000.000	Rp.600.000.000
Leksula	Rp.300.000.000	Rp.2.400.000.000	Rp.600.000.000
Namrole	Rp.300.000.000	Rp.2.400.000.000	Rp.600.000.000
waesama	Rp.300.000.000	Rp.2.400.000.000	Rp.600.000.000
Total	Rp.15.000.000.000	Rp.12.000.000.000	Rp.3.000.000.000

Sumber : Badan Pemberdayaan Kab Buru Selatan

Mengingat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan terutama untuk masyarakat Kabupaten Buru Selatan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemandirian masyarakat dan peningkatan pendapatan ekonomi keluarga dalam pengembangan usaha di Desa Leksula Kecamatan Leksula Buru Selatan.

TINJAUAN TEORITIS

Pembangunan perdesaan. Pembangunan perdesaan merupakan pembangunan yang berkelanjutan dan lestari yang mensyaratkan setiap anggota masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam proses pembangunan. Setiap perencanaan pembangunan perdesaan harus melibatkan seluruh unsur masyarakat desa (*Bottom Up Planning*) dengan unsur perencanaan dari atas (*Top Down Planning*) sehingga tercipta proses pembangunan desa yang komprehensif. Setiap perencanaan pembangunan perdesaan harus memuat unsur-unsur pokok antara lain strategi dasar sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan, kerangka rencana makro, sumber-sumber pembiayaan baik dari pemerintah dan masyarakat serta kerangka program pembangunan perdesaan. Strategi pembangunan desa yang berlaku pada masa Orde Baru berpijak dari berbagai problema dan masalah yang terjadi tanpa mau mengetahui secara lebih jauh apa penyebab dari timbulnya permasalahan tersebut. Dengan demikian penyelesaiannya juga seakan tidak sesuai dengan permasalahan yang terjadi sebenarnya. Dalam strategi tersebut masyarakat tidak secara langsung dilibatkan sebagai agen pembangunan (*development agent*), sedangkan strategi yang baik haruslah melibatkan masyarakat, karena merekalah yang sebagai penggerak dan penentu arah kebijakan atau dengan kata lain sebagai agen pembangunan Suhandoyo dkk (2000). Suhandoyo dkk (2000) memberikan pendapatnya bahwa kesulitan utama yang dihadapi dalam rangka

pembangunan perdesaan adalah adanya keterkaitan yang sangat erat antara pembangunan perdesaan dengan pemberdayaan masyarakat. Lebih jauh dikatakannya bahwa pemberdayaan tersebut meliputi antara lain usaha-usaha ekonomi rakyat yang kecil, lemah dan miskin yang membutuhkan kebijakan dan strategi pemihakan yang sungguh terarah yang mencakup 3 (tiga) bidang yaitu :

- (1) Menciptakan iklim/suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang;
- (2) memperkuat potensi ekonomi masyarakat;
- (3) melindungi kelompok ekonomi rakyat yang masih lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Lebih lanjut Suhandoyo(2000) menjelaskan bahwa pembangunan perdesaan yang memberdayakan masyarakat desa, pada gilirannya akan menjamin pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*), karena dengan pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan kemandirian masyarakat. Dengan kemandirian masyarakat maka ketergantungan masyarakat pada pemerintah yang berfungsi sebagai *provider* (penyedia) prasarana dan sarana perekonomian akan semakin berkurang. Pembangunan desa yang dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa antara lain mempunyai target kualitatif dan kuantitatif seperti yang tercantum dalam buku pedomannya (Dirjen Bandes,1987) yaitu :

- a. Mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada;
- b. Mempercepat pencapaian pemerataan pembangunan melalui 8 jalur pemerataan di seluruh Indonesia;
- c. Mampu memberikan input bagi pertumbuhan ekonomi lokal, regional dan nasional;
- d. Memantapkan ketahanan nasional.

Untuk menjelaskan paradigma tentang pembangunan khususnya pembangunan desa pada era reformasi, ada paradigma pembangunan yang menjelaskan bahwa fungsi Pemerintah dalam proses pembangunan hendaknya berubah dari fungsi sebagai *provider* atau sebagai penyedia prasarana dan sarana pembangunan menjadi fungsi sebagai *enabler* atau sebagai fasilitator dalam pembangunan. Fungsi Pemerintah sebagai *provider*

pada masa sebelum reformasi, artinya adalah bahwa Pemerintah berfungsi sebagai penyedia, yaitu melaksanakan penyediaan sebagian besar prasarana dan sarana pembangunan. Pada era ini dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat kurang. Bila fungsi Pemerintah sebagai *enabler* (fasilitator) diharapkan bahwa inisiatif atau prakarsa masyarakat jauh lebih banyak. Pemerintah sebagai fasilitator tetap melaksanakan fungsi sebagai penyedia prasarana dan sarana pembangunan, utamanya untuk pembangunan yang memerlukan dana yang besar, tetapi untuk pembangunan yang perlu lebih banyak partisipasi masyarakat, peran pemerintah harus dikurangi. Dengan paradigma tersebut berarti bahwa kegiatan pembangunan yang kegiatannya bertumpu pada kemampuan dan prakarsa masyarakat harus didorong. Oleh karena itu salah satu proses pembangunan yang sedang berlangsung yaitu Program Pengembangan Kecamatan dimaksudkan untuk pembangunan perdesaan dengan Pemerintah sebagai penyedia dana dengan kegiatan yang diarahkan pada kegiatan perekonomian masyarakat.

Tahapan Dalam Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa implikasi bahwa Daerah diharapkan mampu membiayai sendiri pembangunan yang direncanakan. Untuk membiayai pembangunan tersebut, maka mau atau tidak Pemerintah Daerah harus berusaha untuk meningkatkan kemampuannya untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga akan tetap menjamin jalannya sistem Pemerintahan Daerah beserta seluruh kehidupan politik, sosial dan ekonomi. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut, dapat dilakukan antara lain dengan menggali potensi ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah tersebut strategi yang dapat ditempuh menurut Suparmoko (2001) adalah dengan :

- a. Mengidentifikasi sektor-sektor mana yang berpotensi untuk dikembangkan
- b. Mencari penyebab sektor-sektor yang potensi-

nya rendah untuk dikembangkan

- c. Mengidentifikasi sumber daya yang ada (SDA dan SDM) yang siap digunakan untuk mendukung perkembangan sektor yang siap dikembangkan
- d. Menggunakan analisis pembobotan dapat ditentukan sektor andalan yang siap dikembangkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pajak daerah dan retribusi daerah besar atau kecilnya penerimaan tergantung pada jumlah dan macam obyek pajak dan retribusi daerah, tarif pajak dan retribusi, serta dasar pajak daerah. Tarif pajak dan retribusi daerah tergantung pada kehendak pemerintah daerah untuk menetapkan berdasarkan undang-undang, tetapi jumlah dan macam obyek pajak serta dasar pengenaan pajak daerah akan tergantung pada kondisi ekonomi masyarakat. Apabila kondisi perekonomian masyarakat maju, maka akan semakin banyak macam dan obyek pajak yang dapat ditarik, dengan kata lain agar PAD maju perekonomian harus didorong agar dapat berkembang. Menurut Suparmoko (2001) perkembangan perekonomian daerah dapat terjadi karena peningkatan produktivitas dan pendapatan pada kegiatan ekonomi yang sudah ada (*intensifikasi*) dan arena timbulnya usaha baru (*ekstensifikasi*) atau dapat pula karena perkembangan secara *intensifikasi* dan *ekstensifikasi*.

METODE

Dalam rangka menganalisis dampak implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam upaya pemberdayaan usaha ekonomi produktif ini, yang menjadi populasi adalah keseluruhan anggota masyarakat di Kecamatan Leksula penerima program yang kegiatannya pada Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sedangkan yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah akan diambil dari populasi dengan menggunakan metode *Simple Random Sampling*, pemilihan sampel sebanyak 86 orang yaitu dengan cara acak dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap populasi untuk menjadi anggota sampel.

Untuk membuktikan hasil penelitian bahwa ada peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi dalam Program Pengembangan Kecamatan digunakan uji statistik parametrik dengan menggunakan alat analisis regresi sederhana (Efferin dkk, 2008) analisis regresi ini dipergunakan untuk melakukan prediksi terhadap suatu variabel numerik berdasarkan pada nilai dari satu atau lebih variabel yang lain dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \epsilon_i$$

Dimana :

β_0 = Y intercept dari populasi

β_1 = Slope dari populasi

ϵ_i = Kesalahan acak pada Y untuk observasi i

Y = Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) (variabel dependen)

X_1 = Masyarakat Penerima PNPM-MP

$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \epsilon_i$ adalah merupakan persamaan linier (garis lurus). Slope dari suatu garis lurus dipresentasikan dengan $\hat{\alpha}_1$, yaitu terjadi perubahan sebesar variable Y unit akibat dari perubahan variable X unit. Atau dapat juga dikatakan bahwa variable Y akan berubah (positif atau negative) karena adanya pengaruh perubahan pada variabel X unit. Y intercept $\hat{\alpha}_0$ dari populasi merupakan mean value dari variable Y ketika variable X sama dengan 0, atau disebut juga dengan konstanta. Komponen terakhir dari model tersebut ($\hat{\alpha}_i$ = Kesalahan acak pada Y untuk observasi i) mempresentasikan kesalahan acak pada variable Y setiap observasi i muncul. Dengan kata lain $\hat{\alpha}$ merupakan jarak vertikal Y di atas atau dibawah garis. Pemilihan model matematis ini sangat bergantung pada distribusi dari nilai X dan Y pada masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pemberdayaan Masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) diluncurkan sebagai tindak lanjut dari program-program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sebelumnya seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pemberdayaan Masyarakat Dampak Krisis Ekonomi (PDM-

DKE) dengan titik berat program pada pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan di tingkat kecamatan/distrik dan desa. Pendekatan pemberdayaan masyarakat menurut Program Pengembangan Kecamatan disini pada hakekatnya adalah pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan kebutuhan nyata mereka dan memutuskan sendiri pilihan kegiatannya secara demokrasi.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sebagai dukungan lebih lanjut terhadap Program Inpres Desa Tertinggal menurut Buku Pedoman Umum Operasional Program Pengembangan Kecamatan Departemen Dalam Negeri (2002) Pembangunan Desa yang dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa antara lain mempunyai target kualitatif dan kuantitatif seperti yang tercantum dalam buku pedomannya (Dirjen Bandes, 1987) yaitu adalah kegiatan dalam bentuk bantuan modal usaha dan penyediaan prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan ekonomi produktif melalui kelembagaan di tingkat kecamatan dan desa. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan media pembelajaran bagi masyarakat dan aparat melalui kegiatan pengambilan keputusan yang demokratis dan transparan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian program kegiatan.

Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) secara umum diarahkan pada hal-hal antara lain :

1. Peningkatan ekonomi masyarakat
Peningkatan ekonomi masyarakat artinya bahwa berdasarkan kemampuan yang dimiliki masyarakat, Pemerintah memberikan dana yang diharapkan dapat mendorong berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi rakyat. Berkembangnya ekonomi rakyat tersebut diharapkan akan dapat menciptakan lapangan kerja dan kegiatan perekonomian yang baru yang dapat menampung tenaga kerja.
2. Peningkatan pendapatan masyarakat
Bila tujuan yang pertama yaitu peningkatan ekonomi rakyat baik yang sudah ada maupun yang baru tumbuh dapat tercapai, maka diharapkan pula akan terjadi peningkatan

pendapatan masyarakat. Dengan peningkatan pendapatan masyarakat, diharapkan akan tercipta suatu kondisi di mana prosentase golongan masyarakat berpendapatan rendah akan semakin turun yang pada gilirannya akan mengurangi masyarakat miskin dan meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat.

Untuk mengetahui besarnya dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNMP-MP) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di desa Leksula Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan dapat kita lihat pada tabel 5.

Berdasarkan hasil tabel dapat dilihat bahwa pemberian kredit usaha yang diberikan oleh

PNPM-MP kepada para nasabah tersebut berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha mereka yaitu pendapatan yang mereka peroleh mengalami peningkatan setelah adanya pemberian kredit langsung mandiri. Pemberian kredit yang optimal akan meningkatkan pendapatan artinya pengembalian kredit sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang positif antara pinjaman yang diberikan terhadap peningkatan pendapatan usaha.

Hasil Uji Hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel masyarakat Penerima PNMP-MP (X) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan

Tabel 5
Perkembangan Usaha, Pendapatan Per Bulan
Sesudah dan Sebelum Memperoleh Bantuan Kredit PNPM-MP

No	Nama Peminjam	Bidang Usaha	Besar Pinjaman	Pendapatan Per Bulan	
				Sebelum	Sesudah
1.	Petrus Lesnussa	minyak tanah	Rp 10.000.000	Rp 750.000	Rp 1.500.000
2.	Heny Lesnussa	kios sembako	Rp 7. 000.000	Rp 450.000	Rp 600.000
3.	Jacob Behuku	perikanan	Rp 10.000.000	Rp 650.000	Rp 1.250.000
4.	Seli Lesnussa	ojek	Rp 7. 000.000	Rp 300.000	Rp 450.000
5.	Cica Behuku	perikanan	Rp 10.000.000	Rp 400.000	Rp 550.000
6.	Erwin Lesnussa	warung makan	Rp 10.000.000	Rp 950.000	Rp 1.750.000
7.	Meshak Lebetubun	nelayan	Rp 5.000.000	Rp 275.000	Rp 360.000
8.	Jonaes Biloro	kios pulsa	Rp 3.000.000	Rp 700.000	Rp 950.000
9.	Erina E Wemassee	warung makan	Rp 10.000.000	Rp 850.000	Rp 1.350.000
10.	Nikodemus Saleky	nelayan	Rp 5.000.000	Rp 550.000	Rp 900.000
11.	Sin Solissa	minyak kayu putih	Rp 10.000.000	Rp 500.000	Rp 1.275.000

Sumber : Hasil Olahan Penelitian

Tabel 6
Hasil Estimasi Model

Variable	Koefisien	t statistik	Prob.
Konstanta	6,126	2.059	0,1442
X1	0,934	0.554	0,0661
R square		: 0,678	
Adjusted R square		: 0,347	
F statistic		: 1,342DW	
statistic		: 1,801	

Sumber: data olahan

Ket.: *) signifikan pada $\alpha = 5\%$

Masyarakat (Y) dan secara parsial variabel X_1 (Masyarakat Penerima PNPM-MP) signifikan terhadap Y (pendapatan masyarakat). Untuk nilai R^2 sebesar 0,678 atau variasi perubahan variabel independen hanya mampu menjelaskan variasi perubahan variabel dependen sebesar 67,8% sedangkan sisanya sebesar 33,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model, dapat dilihat pada tabel 6.

Berdasarkan hasil uji model pemberian kredit PNPM-MP terhadap kelompok usaha yang ada di desa Leksula Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara teoritis pengaruh pemberian kredit usaha akan meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya pendapatan akan berpengaruh terhadap meningkatnya investasi yang mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi akan meningkatkan pendapatan, peningkatan pendapatan akan meningkatkan pajak yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan melihat bahwa adanya hubungan korelasional antara variabel Masyarakat Penerima bantuan PNPM-MP (X) terhadap variabel Pendapatan masyarakat (Y) maka ada beberapa kemungkinan yang dapat diamati.

Kemungkinan yang pertama adalah pola investasi akan selalu berkembang seiring dengan berkembangnya faktor-faktor ekonomi masyarakat yang semakin kompetitif. Di sisi lain analisis mengenai pengaruh pemberian kredit usaha terhadap peningkatan pendapatan penpedaang masyarakat menunjukan hasil yang positif dan meyakinkan. Secara konkrit pengaruh yang positif tersebut berarti bahwa BPR Irian Sentosa telah menunjukan peranannya sebagai institusi mitra pemerintah dan masyarakat yang secara tak langsung mampu mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga.

Pengkajian mengenai pengaruh pemberian kredit usaha PNPM-MP terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara kuantitatif telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan model persamaan linier regresi sederhana. Setelah melalui berbagai tahapan pengujian secara statistik

maupun, model menunjukkan bahwa kredit usaha PNPM-MP mampu mempengaruhi pertumbuhan pendapatan usaha secara positif dan signifikan dan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat penerima bantuan PNPM-MP di desa Leksula Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan.

Besaran koefisien pada variabel independen menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel independen. Variabel pemberian kredit usaha PNPM-MP (X) memiliki koefisien sebesar 6,126 yang berarti apabila pemberian kredit usaha PNPM-MP terhadap pendapatan masyarakat meningkat sebesar 1%, maka pendapatan masyarakat penerima bantuan PNPM-MP akan meningkat sebesar 6,12%; terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (Y). Artinya salah satu faktor utama penentu pertumbuhan ekonomi daerah adalah sumber daya modal, sumber daya tersebut bisa digali dari sumber dana investasi swasta maupun dana investasi pemerintah daerah berupa pemberian kredit guna menunjang pembangunan ekonomi suatu daerah yang lebih baik yang ditentukan dengan pertumbuhan ekonomi oleh akumulasi faktor-faktor produksi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka peneliti dapat menyusun dan merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai penguraian pada bab pendahuluan di mana perairan Maluku memiliki sumberdaya perikanan yang potensial, dan terdiri atas dua kelompok jenis sumberdaya hayati laut yaitu kelompok ikan (*fishes*) dan kelompok bukan ikan (*non fishes*) seperti udang, rumput laut, batulaga, teripang dan lain-lain. Penyebaran potensi perikanan tidak merata, tetapi membentuk jalur pergerakan ikan atau migrasi ikan. Hal itu karena laut Maluku merupakan pertemuan antara dua samudera terbesar di dunia yakni Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.
2. Sesuai hasil penelitian yang dilakukan di Kota

Ambon pada tiga Kecamatan (Kecamatan Nusaniwe, Sirimau, dan Baguala) di mana usaha penangkapan ikan dipengaruhi oleh alat tangkap, tenaga kerja. Sedangkan variabel cuaca, biaya operasional dianggap konstan.

3. Sesuai dengan judul penelitian yakni tingkat produktivitas kerja pada tenaga usaha penangkapan ikan di Kota Ambon pada Kecamatan Baguala tertinggi pada tahun 2007 tingkat produktivitas sebesar 0,00098%, sedangkan yang terendah pada tahun 2009 tingkat produktivitasnya sebesar 0,0044%. Kemudian pada Kecamatan Nusaniwe tertinggi pada tahun 2005 tingkat produktivitas sebesar 0,0077%, sedangkan yang terendah pada tahun 2009 tingkat produktivitasnya sebesar 0,011. Dan untuk Kecamatan Sirimau tertinggi pada tahun 2007 tingkat produktivitas sebesar 0,0087% dan yang terendah pada tahun 2005 dengan tingkat produktivitasnya sebesar 0,022%

Beberapa saran yang dapat dikemukakan berdasarkan penelitian ini adalah :

1. Dengan upah yang diterima oleh para pekerja rendah maka para pekerja akan beralih ke usaha penangkapan ikan yang lain. Misalnya di kecamatan lain yang mempunyai upah sebaliknya tinggi demi untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2. Disarankan bagi pengusaha agar dapat melihat jumlah tenaga kerja yang sebenarnya untuk sekali melaut. Karena sering terjadi jumlah tenaga kerja yang sekali melaut sudah melampaui batas maksimum.
3. Selain itu juga harus diperhatikan ketrampilan atau keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pem-bangunan Desa kualitatif dan kuantitatif (Dirjen Bandes,1987).
- Pedoman Umum Operasional Program Pengembangan Kecamatan Departemen Dalam Negeri, 2002.
- Republik Indonesia,(2004),Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
- Republik Indonesia,(2000),*Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia, (2004),*Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah* Jakarta.
- Republik Indonesia,(2004),*Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat*, Jakarta. 2004
- Soejanto. 1990. *Prospektif Otonomi dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Indonesia*, Jakarta : Rineka.
- Sujuno, E Dkk. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Suparmoko, M. 1999. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek* Edisi keempat. Yogyakarta : BPPE.